



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2016-2021**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh:

Vidia Utami Putri  
0221 18 113

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2022**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2016-2021**

**SKRIPSI**

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022

Vidia Utami Putri

022118113


Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Siti Maimunah., S.E., M.Si.,  
CPSP., CPMP., CAP)



---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Buntoro Heri Prasetya., Ak., MM)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Mutiaras Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak)



---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vidia Utami Putri

NPM : 022118113

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D. I Yogyakarta Tahun 2016-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 10 Juni 2022



Vidia Utami Putri

0221 18 113

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

VIDIA UTAMI PUTRI, 022118113. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D. I Yogyakarta Tahun 2016-2021, dibawah bimbingan Ketua Komisi Bapak BUNTORO HERI PRASETYA, dan Anggota Komisi Pembimbing Ibu MUTIARA PUSPA WIDYOWATI, 2022.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2016-2021.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dengan sampel yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, lalu dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah,, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerinta daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2021”** yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Universitas Pakuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kedua orangtua beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM selaku wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Enok Rusmana, S.E., M.Acc. selaku wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Dosen-dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh Staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan serta informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
13. Syifa Madina Sholeh yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat perkuliahan Maulida Mega Utami, Della Maharani, Putri Nurhayat, Wulan Rahayuningsih, Rena Anggraeni, Siti Umi Salamah, Nabilah Utami Dewi, Nia Septiani, Jodi Febrian, dan Iqbal Resnu Ahmad. Terima kasih atas dukungan dan bantuan serta momen yang luar biasa dari awal perkuliahan sampai saat ini.
15. Sahabat tersayang Zahira Afra dan Sindy Dwiyani yang selalu memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi proses pembelajaran bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 10 Juni 2022

Penulis

Vidia Utami Putri



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.3 Dana Perimbangan.....	13
2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan .....	13
2.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan .....	13
2.4 Belanja Modal .....	15
2.4.1 Pengertian Belanja Modal .....	15

2.4.2	Komponen Belanja Modal .....	15
2.5	Kinerja Keuangan.....	16
2.5.1	Pengertian Kinerja Keuangan.....	16
2.5.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ...	17
2.5.3	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.6	Penelitian Sebelumnya Dan Kerangka Pemikiran.....	19
2.6.1	Penelitian Sebelumnya .....	19
2.6.2	Kerangka Pemikiran.....	27
2.7	Hipotesis Penelitian .....	29
<b>BAB III .....</b>		<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>31</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	31
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	31
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	31
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	32
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	33
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7	Metode Analisis Data .....	33
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	33
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6.3	Uji Regresi Linier Berganda.....	35
3.6.4	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	35
3.6.5	Uji Parsial (Uji t) .....	36
3.6.6	Uji Simultan (Uji F).....	36
<b>BAB IV .....</b>		<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian / Hasil Pengumpulan Data .....	37
4.1.1	Perkembangan dan Kegiatan Usaha (Instansi Pemerintah).....	37
4.1.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	37
4.2	Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti.....	39
4.3	Analisis Data .....	43

4.3.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif .....	43
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
4.3.4 Uji Hipotesis.....	49
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	51
BAB V .....	56
SIMPULAN DAN SARAN .....	56
5.1 Simpulan .....	56
5.2 Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel .....	32
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	44
Tabel 4.2 Uji Normalitas One Sampe Kolmogorov .....	46
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi Durbin-Watson .....	46
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas .....	47
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser .....	47
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.7 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ) .....	49
Tabel 4. 8 Uji Parsial (Uji t).....	50
Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F) .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1 Rasio Kabupaten Kulon Progo .....	40
Gambar 4.2 Rasio Kabupaten Bantul .....	40
Gambar 4.3 Rasio Kabupaten Gunung Kidul.....	41
Gambar 4.4 Rasio Kabupaten Sleman .....	42
Gambar 4.5 Rasio Kota Yogyakarta .....	43
Gambar 4.6 Uji Normalitas Data Grafik Histogram.....	45
Gambar 4.7 Uji Normalitas Data Grafik P-P Plot .....	45
Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas Diagram Scatterplot .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Perwujudan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas suatu daerah adalah terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kinerja adalah hasil dari program atau kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundangan selama periode anggaran, bentuk pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan (Leki dkk, 2018).

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah berupaya dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dinilai baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan menilai sejauh mana keandalan dalam Laporan Keuangan Daerah yang mencakup penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian daerah (Mahmudi, 2016). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah dimana semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi yang akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio ketergantungan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah dimana semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menandakan kurangnya baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Rasio kemandirian daerah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dimana semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Lathifa & Haryono, 2019). Seperti yang dilansir oleh Saputra (2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengkritisi ketergantungan perekonomian daerah pada pemerintah pusat yang masih tinggi walaupun otonomi daerah sudah berjalan selama 20 tahun. Ia menjelaskan persentase ketergantungan ekonomi daerah terhadap pusat mencapai 80,1 persen, sedangkan pendapatan asli daerah hanya sebesar 12,87 persen, maka Airlangga mengarahkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah masing-masing (Bisnis.com). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menilik anggaran belanja daerah yang masih minim. Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu, Astrea Primanto Bhakti menyayangkan komposisi belanja daerah yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk belanja modal hanya sebesar 5-6 persen seperti yang dilansir oleh Ridwansah, 2021 (JawaPos.com).

Fenomena diatas memperlihatkan tingkat kemandirian daerah yang rendah sehingga masih bergantungnya pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah pusat dalam merealisasikan belanja daerahnya. Masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung seperti gaji pegawai daripada proporsi belanja langsung termasuk belanja modal menyebabkan rendahnya nilai kinerja keuangan pemerintah daerah di mata masyarakat menurut Yunita dan Rasmini (2020) . DJPK juga menunjukkan data dana perimbangan yang masih mendominasi keseluruhan pendapatan dengan porsi sebesar 60,9% atau 666,7 triliun sedangkan Pendapatan asli daerah hanya memiliki porsi 24,6% atau 269,3 triliun dari keseluruhan pendapatan daerah yang mencapai Rp1.095 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. Keadaan ini menunjukkan belum baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini pun terjadi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pada penerimaan daerahnya, Pendapatan asli daerah dibantu oleh Dana perimbangan dalam merealisasikan belanja daerahnya. Realisasi PAD, Dana perimbangan dan Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 1. 1*  
**Realisasi PAD, Dana perimbangan, dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2016-2021**  
**(ribu rupiah)**

Pemerintah Kab/Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
Kabupaten Kulon Progo	2016	180.273.364	957.551.589	241.983.753
	2017	249.692.649	942.334.185	258.766.495
	2018	211.047.699	973.566.098	340.494.386
	2019	237.876.805	1.039.945.781	421.935.544
	2020	247.920.164	1.062.723.464	450.567.715
	2021	307.150.000	1.044.080.000	203.130.000
Kabupaten Bantul	2016	404.454.704	1.331.352.777	284.060.533
	2017	494.179.068	1.287.256.263	284.060.533
	2018	462.653.956	1.355.455.930	338.160.113
	2019	505.929.472	1.351.157.101	336.714.472
	2020	469.798.331	1.393.629.491	393.336.482
	2021	491.670.000	1.284.840.000	274.290.000
Kabupaten Gunung Kidul	2016	206.278.866	1.239.624.999	234.690.534
	2017	271.370.044	1.250.742.434	396.845.244
	2018	227.299.980	1.273.791.667	305.415.955
	2019	254.810.945	1.323.197.557	493.784.689
	2020	245.880.406	1.376.965.341	450.211.539
	2021	236.370.000	1.519.730.000	232.790.000
Kabupaten Sleman	2016	717.151.176	1.321.660.505	344.002.326
	2017	825.637.752	1.335.572.521	382.627.055
	2018	894.272.961	1.368.717.994	411.312.405
	2019	927.049.575	1.371.364.974.	451.531.361
	2020	944.481.899	1.431.579.787	503.490.284
	2021	803.680.000	1.403.590.000	433.710.000



Pemerintah Kab/Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
Kota Yogyakarta	2016	540.504.305	875.430.545	259.589.341
	2017	657.049.377	870.512.719	294.300.955
	2018	667.493.075	867.706.456	352.092.739
	2019	689.049.726	875.308.178	327.434.372
	2020	671.770.479	908.779.706	339.946.504
	2021	598.120.000	884.850.000	240.010.000

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta*

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 yang dilansir oleh BPS Provinsi D.I Yogyakarta. Pada tabel diatas, pendapatan asli daerah masih jauh dibawah dana perimbangan dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Rata-rata pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo sebesar 15,43%, Kabupaten Bantul sebesar 21,73%, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 12,65%, Kabupaten Sleman sebesar 32,10%, dan Kota Yogyakarta mencapai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 37%. Serta kontribusi pendapatan asli daerah yang tidak selalu dapat membiayai belanja modal (Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul) mengindikasikan ketidakmampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran belanja daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan bantuan berupa dana transfer dari pemerintah pusat yang berbentuk dana perimbangan. Alhabsyi (2017) menyebutkan rendahnya pendapatan asli daerah dalam peran serta pembiayaan belanja perlu mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini membuat kontribusi dana perimbangan yang lebih tinggi daripada pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akibat kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, menurut Maulina dkk (2021) kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah akan berdampak pada keuangan daerah yang dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menyebutkan dengan penambahan satu satuan dari pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja keuangan. Dana transfer pusat yang lebih tinggi menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Meningkatnya dana transfer pusat yang diterima daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku yang diiringi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas dan

sarana prasarana publik dari pengalokasian dana transfer pusat berbentuk dana perimbangan tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pratiwi (2018) menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi daerah. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Harahap (2020) menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektifitas menunjukkan hasil kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang cukup baik. Meskipun derajat desentralisasi masih rendah dan penerimaan PAD yang tidak mencapai target sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat/provinsi masih tinggi.

Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Lathifa dan Haryanto (2019) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan variabel Pendapatan asli daerah dan Belanja modal. Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh PAD dan Belanja Modal dengan hasil uji analisis yang menunjukkan hubungan berpengaruh positif signifikan. Jika pendapatan daerah mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik dan belanja modal yang berpengaruh menandakan peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah dengan pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Variabel dana perimbangan juga dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) dalam penelitiannya menguji terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dana perimbangan yang digunakan untuk sumber pendanaan guna kegiatan pembangunan daerah sehingga meningkatkan Pendapatan asli daerah dan daerah dapat mendanai kegiatannya sendiri. Maka dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Pendapatan asli daerah atau sering disebut PAD merupakan sumber pendapatan asli yang digali melalui potensi-potensi daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menjelaskan bahwa ada pengaruh positif Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa PAD merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dimana semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka kinerja keuangannya semakin baik.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah akan memicu ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan keuangan daerahnya sehingga menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalokasian belanja modal diadakan untuk memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan publik sebaik-baiknya sehingga menciptakan efisiensi dan produktivitas masyarakat meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah daerah mengubah komposisi belanja daerah guna pemanfaatannya dapat lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, pengelolaan belanja modal akan memengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah (Yanti 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah penting untuk dilakukan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Belanja modal terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan Belanja modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang masih rendah dimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar 15,43%, Kabupaten Bantul sebesar 21,73%, Kabupaten Gunung Kidul memiliki persentase kontribusi PAD terendah yaitu 12,65%, Kabupaten Sleman sebesar 32,10%,

dan Kota Yogyakarta meskipun menduduki persentase tertinggi namun tetap tidak melebihi proporsi dana perimbangan yaitu sebesar 37%. Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan untuk pengelolaan pembiayaan belanja daerah termasuk belanja modal guna tercapainya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik. Kemandirian pemerintah daerah yang masih rendah dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah ini terlihat dari nilai belanja modal yang tidak selalu terpenuhi oleh pendapatan asli daerah yang terjadi pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, sehingga proporsi dana perimbangan selalu lebih tinggi dalam penerimaan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021?
2. Apakah Dana perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021?
3. Apakah Belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021?
4. Apakah Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dengan metode yang tepat, kemudian menarik kesimpulan apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta serta memberikan saran terkait Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Belanja modal agar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021.
2. Untuk menguji pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021.
3. Untuk menguji pengaruh Belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021.
4. Untuk menguji pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan Belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2016-2021.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai referensi dalam mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada instansi pemerintah daerah dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan referensi mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan khususnya terhadap pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Akuntansi Sektor Publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya cakupan sektor publik yang menyebabkan pandangan dan definisi yang berbeda dari setiap disiplin ilmu (politik, hukum dan sosial ekonomi). Menurut Mardiasmo (2018), sektor publik dalam sudut pandang ekonomi merupakan sebagai entitas (satuan) yang kegiatannya terkait dengan upaya menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas akuntansi yang dilakukan pada peristiwa dan transaksi keuangan dari organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga didefinisikan sebagai praktik akuntansi yang berlaku untuk pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor bisnis dimana tujuan sektor bisnis merupakan mencari laba sedangkan organisasi sektor publik bertujuan selain mencari laba (Majid, 2019).

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa akuntansi sektor publik merupakan proses mekanisme akuntansi yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengukuran, pengidentifikasian serta pelaporan transaksi keuangan dalam entitas publik yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengambilan keputusan keuangan.

##### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

*American Accounting Association* dalam Majid (2019) menyatakan tujuan diadakannya akuntansi sektor publik, diantaranya:

- 1) *Accountability*, yaitu tujuan yang digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada pemerintah publik mengenai operasi pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dan bisa dipergunakan dalam laporan pertanggungjawaban setiap bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada dibawahnya.
- 2) *Management control*, yaitu tujuan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta ekonomis atas pengelolaan penggunaan sumber daya yang dianggarkan.

Akuntansi sektor publik bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam akuntabilitas publik serta kondisi yang efektif dan efisien. Transparansi yang dimaksud adalah pelaporan

keuangan yang disajikan secara nyata tanpa ada yang disembunyikan. Akuntabilitas publik ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Dari transparansi dan akuntabilitas, akuntansi sektor publik juga dituntut efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaannya agar penghematan waktu serta biaya sehingga kinerja dapat berjalan baik.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim dalam Priyono dkk (2020), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Hastuti (2018) juga menjelaskan bahwa, pendapatan asli daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan atau otoritas yang diberikan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diterima pemerintah daerah melalui sumber-sumber potensi daerah asli yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Adapun penjelasan mengenai sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan dalam dua jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang tersaji dalam tabel berikut.

##### **a. Pajak Provinsi**

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4) Pajak Air Permukaan; Dan

5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada UU yang sama, objek retribusi digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, diantaranya:

a. Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6) Retribusi Pelayanan Pasar;

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha meliputi:
    - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
    - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
    - 4) Retribusi Terminal;
    - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
    - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
    - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
    - 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
    - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu diantaranya:
    - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
    - 3) Retribusi Izin Gangguan;
    - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
    - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang merupakan pendapatan atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), milik pemerintah (BUMN) dan perusahaan milik swasta. Jenis pendapatan ini menurut objek pendapatan yang mencakup:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah sebagian laba perusahaan daerah, yang terdiri dari perusahaan dibidang jasa keuangan dan perbankan atau bidang lain seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan, dan lain-

lain. Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2.3 Dana Perimbangan

### 2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah antar daerah dan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah (Heryanti, dkk 2019).

Menurut Djaenuri dalam Pratiwi (2018) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

### 2.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Adapun penjelasan dari klasifikasi dana perimbangan sebagai berikut:

#### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Adapun dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari cukai merupakan cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: (1) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan; (2) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah; (3) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah; (4) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan daerah; dan (5) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum atau yang disebut DAU merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU antar daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal atau merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Proporsi DAU ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana alokasi umum merupakan pelaksanaan atas desentralisasi dalam rangka otonomi daerah. Total nilai dana alokasi umum secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan dikurangi penerimaan negara yang dibagi kepada daerah. Ketentuan ini secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan ketentuan untuk dana perimbangan bahwa dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah yang merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas ke pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

## **2.4 Belanja Modal**

### **2.4.1 Pengertian Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatann dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Dijelaskan oleh Hastuti (2018), belanja modal adalah pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal, yang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan bentuk fisik lainnya.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode.

### **2.4.2 Komponen Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan atas klasifikasi anggaran (PMK 02) menyebutkan 5 kategori utama belanja modal adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian, balik nama, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat administratif yang berkaitan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya guna memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian/biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.

d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya

perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambahkan nilai asset dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. **Belanja Modal Lainnya**

Belanja modal lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan. Yang termasuk kedalam belanja modal lainnya adalah kontrak sewa beli, pengadaan barang kesenian, barang purbalaka dan barang museum, hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk juga belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

## **2.5 Kinerja Keuangan**

### **2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, yang disebut kinerja adalah hasil keluaran dari kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kinerja keuangan merupakan pengukuran pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan suatu instansi. Menurut Pratiwi (2018), yang dimaksud kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil pengukuran dalam melihat kondisi pencapaian pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengungkapkan tingkat pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan daerah dan belanja daerah menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan perundang-undangan (Putri dan Darmayanti, 2019).

Menurut Wibowo dalam Heryanti, dkk (2019) pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan daerah terdapat perbedaan dari rencana atau hasil kinerja telah sesuai dari yang direncanakan.

### 2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Groves dalam Febriansyah (2019), disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dibagi atas faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*), namun keduanya tidak terlepas dari faktor organisasi atau *organizational factors*). Faktor keuangan diantaranya terdiri atas *revenue*, *expenditure*, *operating position*, *debt structure*, *unfunded liabilities*, dan *condition of capital fund* yang masing-masing dibagi kembali menjadi sub variabel yang mempengaruhinya. Dalam penelitiannya yang menjadi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dalam faktor lingkungan terdiri atas *community need and resources*, *external economic conditions*, *inter-governmental constrains*, *natural disaster and emergencies*, dan *political cultures*. Sedangkan yang termasuk kedalam faktor organisasional yaitu kebijakan legislatif dan praktik manajemen.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyebutkan faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu *revenue* dan *expenditure*. *Revenue* merupakan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. *Expenditure* merupakan pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu atau disebut sebagai belanja yang dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan penelitian Nugraheni dan Adi (2020) dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, menemukan delapan faktor diantaranya, tingkat ketergantungan pada pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, ukuran pemerintah daerah, temuan audit, *leverage*, ukuran legislatif dan pendapatan pajak daerah.

### 2.5.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun dalam Martantri (2019) menjelaskan bahwa Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah dan perbandingan antara kesesuaian tujuan dan implementasinya (Ayu, 2018).

Mardiasmo pada Maulina (2021) mengatakan, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan guna memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan;

- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016) analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari laporan keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio keuangan merupakan alat ukur atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah (Febriansyah, 2019). Rasio yang digunakan pada penelitian menggunakan tiga rasio, yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Berikut ini ketiga pengukuran dan perhitungannya:

- a. Derajat Desentralisasi

Rasio ini mengungkapkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka mengindikasikan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

## 2.6 Penelitian Sebelumnya Dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

*Tabel 2. 1*  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yuliasi Leki, Amran T. Naukoko, Dan Jecline L. Sumual 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Variabel Independen: - Pendapatan asli daerah - Belanja modal  Variabel Dependen: Kinerja keuangan	Rasio keuangan	Analisis regresi linier berganda	- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. - Pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di kabupaten Halmahera Barat.
2.	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sendana, 2018, Pengaruh Pendapatan	Variabel Independen: - PAD - Belanja Modal	- Rasio Pertumbuhan	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah



	Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			- Belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Dwi Saraswati Dan Yunita Sari Rioni, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: - Pendapatan asli daerah - Ukuran pemerintah daerah - Leverage  Variabel Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	Analisis regresi linier berganda	- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,021. - Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai sig 0,551. - Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai sig 0,959.
4.	Hasna Lathifa Dan Haryanto, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: - Pendapatan asli daerah - Belanja modal  Variabel Dependen: Kinerja keuangan	Rasio pertumbuhan	Regresi linier berganda	- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Pendapatan asli daerah dan belanja

	Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	pemerintah daerah			modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5.	Nanda Dipa Prastiwi Dan Andri Waskita Aji, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan - Dana Keistimewaan - Belanja Modal  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah	Analisis regresi linear berganda	- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan - dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan - dana keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan - belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dan secara simultan PAD - dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah	Variabel Independen: - PAD	- Rasio efisiensi	Regresi linear berganda	- DAU dan DAK berpengaruh terhadap kinerja

	Dan Yulia Army Nurcahya, 2020, Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU</li> <li>- DAK</li> <li>- DBH</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja keuangan</li> </ul> <p>Kesejahteraan masyarakat</p>	keuangan daerah Indeks pembangunan manusia		<p>keuangan daerah dengan nilai jauh dibawah 0,05.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai f hitung 3,262 dan probabilitas 0,014.</li> <li>- Kinerja keuangan dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, DBH sebesar 9,9% dan 90,1% dipengaruhi oleh variabel lain.</li> <li>- PAD dan DAU berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.</li> <li>- Secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai f hitung 29,622 dan probabilitas 0,000.</li> </ul>
7.	Ihsan Wahyudin dan Hastuti, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD</li> <li>- Dana Perimbangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Kemandirian</li> <li>- Rasio Ketergantungan</li> </ul>	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>

	Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	- Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Rasio Desentralisasi Fiskal		- Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Secara simultan, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8.	Putu Venny Yunita dan Ni Ketut Rasmini, 2020, Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan	Variabel Independen: - PAD - Dana Perimbangan - Belanja Modal  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Variabel Pemoderasi:	- Rasio Desentralisasi Fiskal - Rasio Kemandirian - Rasio Ketergantungan	Analisis Regresi moderasi	- PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada

		Partisipasi Masyarakat			kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	Alfia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira, 2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD</li> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Belanja Modal</li> <li>- Ukuran pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Realisasi Pendapatan Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
10.	Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo, 2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah</li> <li>- Dana perimbangan</li> <li>- Belanja modal</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	- Rasio kemandirian daerah	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>

	Pemerintah Daerah.				
--	--------------------	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada penelitian Yulianti Leki, Amran T. Naukoko, dan Jacline L. Sumual (2018) terdapat kesamaan dalam variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, dan kesamaan metode analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2008-2017 dengan variabel independen Pendapatan asli daerah dan Belanja modal, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 dengan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

Pada penelitian Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sendana (2018) terdapat kesamaan pada variabel yang digunakan yaitu untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan kesamaan analisis data menggunakan data statistik menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2011-2015 dengan pemilihan perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 menggunakan perhitungan kinerja keuangan dengan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan derajat desentralisasi.

Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) adanya persamaan pada variabel yang diteliti yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji statistik. Perbedaan pada penelitian ini pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2017 menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 dengan variabel independen Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

Hasna Lathifa dan Haryanto (2019) adanya kesamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah untuk diteliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan subjek pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 menggunakan perhitungan kinerja keuangan dengan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan derajat desentralisasi.

Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Wakita Aji (2020) adanya kesamaan variabel penelitian yang digunakan yaitu meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan metode analisis regresi linier berganda dan kesamaan subjek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tahun penelitian 2013-2018 dengan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tahun 2016-2021 dengan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah, dan Yulida Army Nurcahya (2020) adanya kesamaan pada variabel penelitian yang diteliti kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini menggunakan dua variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan subjek penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan subjek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) adanya kesamaan pada variabel yang diteliti yaitu menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio desentralisasi fiskal. Perbedaan penelitian ini subjek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 sedangkan penelitian sekarang pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Putu Venny Yunita dan Ni Ketut Rasmini (2020) adanya kesamaan variabel yang diteliti yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu partisipasi masyarakat dengan subjek penelitian pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel pemoderasi dengan subjek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira (2021) terdapat kesamaan pada variabel yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diolah menggunakan model regresi linier berganda. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan variabel ukuran pemerintah dengan subjek penelitian pada Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ester Trinova Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) adanya kesamaan variabel penelitian yang digunakan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah yang diolah menggunakan

model regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini pada subjek penelitian Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

## **2.6.2 Kerangka Pemikiran**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli milik daerah yang digali atas potensi yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya untuk melaksanakan program-program serta aktivitas pembangunan daerah. Kemandirian daerah dalam keuangan daerah sangat diharapkan guna menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Maka, pendapatan asli daerah sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah naik, maka secara tidak langsung kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sendana (2018) yang menyebutkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang diterima oleh daerah dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya. Dana perimbangan yang diterima akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020) yang membuktikan dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif



terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja modal merupakan salah satu belanja daerah yang dimanfaatkan guna membiayai pembangunan asset tetap dan memberikan manfaat dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pembangunan berupa infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Besaran nilai belanja modal mencerminkan banyaknya pembangunan yang terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Perkembangan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah serta meningkatkan modal untuk pemerintah daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi bahkan dari investor sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Malau (2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa dan Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah mengindikasikan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

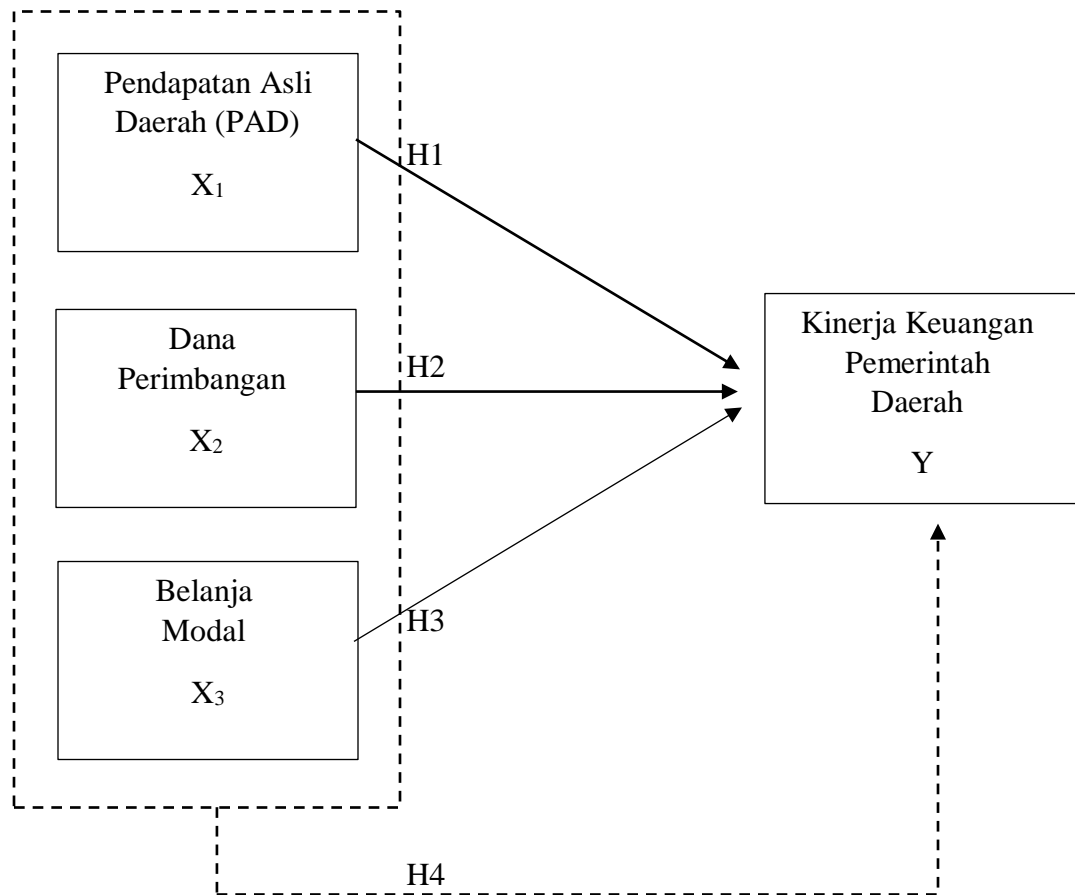
### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerah maka semakin besar dana yang diterima untuk pembangunan daerah dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendapatan daerah memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur keuangan daerah sehingga dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengeluaran daerah atau belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Besaran belanja modal dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin tinggi jumlah belanja modal memperlihatkan

pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah yang tinggi. Sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai baik sebab adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus dan menggunakan statistik kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada menggunakan angka-angka guna memperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan unit analisis *organization* yang diteliti adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) yang berasal dari statistik keuangan daerah 2016-2020 atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK).

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. 1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> <li>- Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</li> <li>- Lain-lain PAD yang Sah</li> </ul>	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Bagi Hasil</li> <li>- Dana Alokasi Umum</li> <li>- Dana Alokasi Khusus</li> </ul>	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal Tanah</li> <li>- Belanja Modal Peralatan dan Mesin</li> <li>- Belanja Modal Gedung dan Bangunan</li> <li>- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</li> <li>- Belanja Lainnya</li> </ul>	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Kemandirian</li> <li>- Rasio Ketergantungan</li> <li>- Derajat Desentralisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Kemandirian = <math>\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+pinjaman}} \times 100\%</math></li> <li>- Rasio Ketergantungan = <math>\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%</math></li> <li>Derajat Desentralisasi = <math>\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%</math></li> </ul>	Rasio

### **3.5 Metode Penarikan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan keseluruhan populasi penelitian yaitu 4 Kabupaten dan 1 Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan 1 Pemerintah Daerah Kota yaitu Kota Yogyakarta.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode pengumpulan data sekunder berupa Statistik Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

### **3.7 Metode Analisis Data**

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji kelayakan dari model regresi linier, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi secara normal dan model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna menentukan apakah data yang akan diolah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan baik atau tidak. Model regresi yang baik, yaitu mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria apabila hasil menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan apabila hasil menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data terdistribusi dengan tidak normal.

### 2. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Autokorelasi merupakan keadaan dimana variabel gangguan pada periode  $t$  berkorelasi dengan variabel  $t-1$ . Autokorelasi dalam regresi liner akan mengganggu sehingga menyebabkan kebiasaan pada kesimpulan. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW test) dengan kriteria  $du < DW < 4-du$  maka tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat apakah dalam regresi terdapat adanya kolerasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Besaran nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance inflation Factor)* dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Model regresi yang bebas dari multikolinieritas harus memenuhi kriteria nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10,00$  maka data tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independennya.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan dalam model regresi antara *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, dimana apabila *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan kriteria jika koefisien parameter beta  $> 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen apabila variabel independennya lebih dari dua. Regresi linier berganda dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunnya nilai). Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk memastikan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. model analisis ini dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Perimbangan

$X_3$  = Belanja Modal

$\varepsilon$  = Standar *error*

### 3.6.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besaran pengaruh variabel independen dan variabel dependen apabila hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besaran nilai  $R^2$  antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ) maka, semakin kecil nilai koefisien determinasi artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Dan apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1 (satu) artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2019).



### 3.6.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, pengujian signifikansi pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) dilakukan menggunakan uji t (t-test) dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $P\ value\ (sig) < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $P\ value\ (sig) > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

### 3.6.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  atau  $P\ value\ (sig) > \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen).
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  atau  $P\ value\ (sig) < \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian / Hasil Pengumpulan Data**

##### **4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha (Instansi Pemerintah)**

Objek pada penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY merupakan Daerah Istimewa yang setingkat dengan provinsi di Indonesia. Secara geografis Provinsi DIY bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, bagian Utara berbatasan dengan Gunung Merapi yaitu gunung paling aktif di dunia, bagian barat berbatasan dengan Sungai Progo dari Provinsi Jawa Tengah, bagian timur berbatasan dengan Sungai Opak dari puncak Merapi yang bermuara di Laut Jawa.

Secara administratif Provinsi DIY terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan luas 568,27 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 Km<sup>2</sup>, dan Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi D. I Yogyakarta dengan luas 35,5 Km<sup>2</sup>.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

1. Visi

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

2. Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulya”, yakni:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup - Kehidupan – Penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan

- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### 3. Struktur Organisasi dan Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibantu oleh Sekretariat Daerah. Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  - 1) Biro Tata Pemerintahan;
  - 2) Biro Hukum; dan
  - 3) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  - 1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam; dan
  - 2) Biro Administrasi Pembangunan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  - 1) Biro Organisasi; dan
  - 2) Biro Umum dan Protokol
- e. Asisten Keistimewaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat daerah memiliki fungsi:

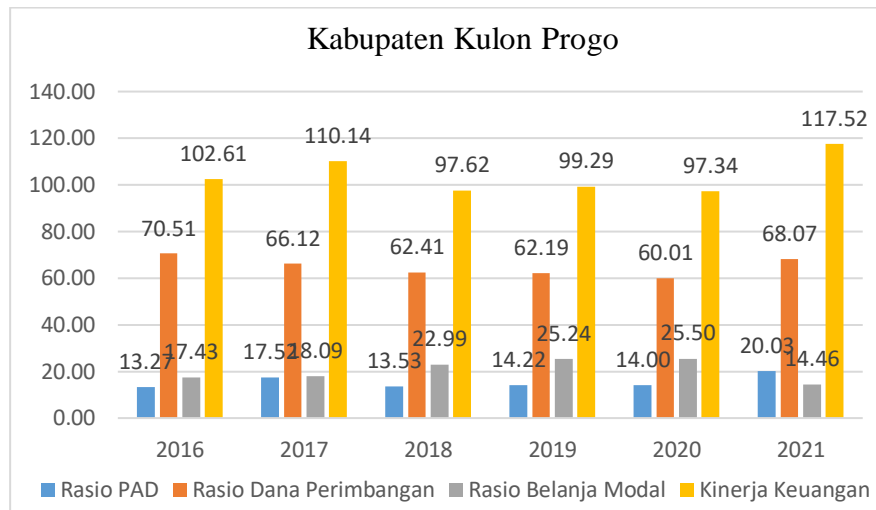
- a. Perumusan program lingkup sekretariat daerah;
- b. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintah dan aparatur pemerintah daerah;

- f. Pengelolaan sarana dan prasarana secretariat daerah;
- g. Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan keuangan secretariat daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti**

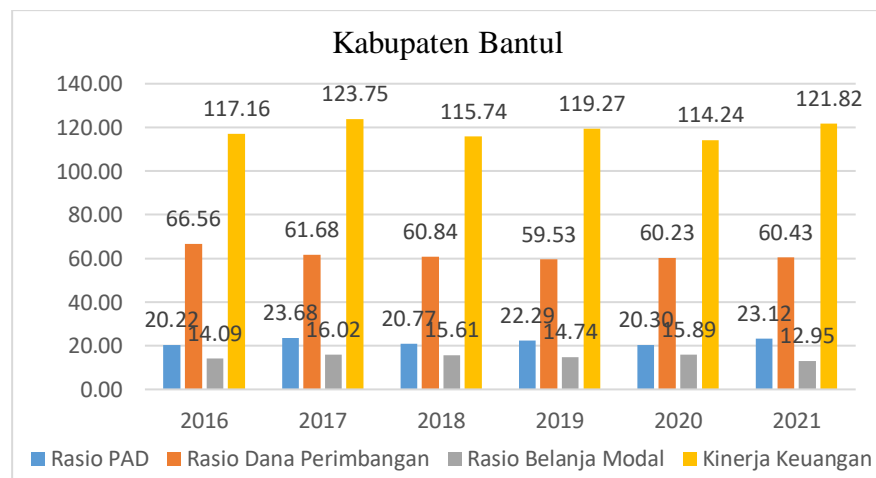
Penelitian ini memiliki empat data yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, dan derajat desentralisasi. Perhitungan rasio kemandirian menggunakan rumus rasio ( $\text{pendapatan asli daerah} / \text{pendapatan transfer} \times 100\%$ ), rasio ketergantungan menggunakan rumus rasio ( $\text{pendapatan transfer} / \text{total pendapatan daerah} \times 100\%$ ), dan derajat desentralisasi menggunakan rumus rasio ( $\text{pendapatan asli daerah} / \text{total pendapatan daerah} \times 100\%$ ). Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh dengan rumus rasio kemandirian + rasio ketergantungan + derajat desentralisasi sehingga menghasilkan nilai kinerja keuangan. Penjelasan perhitungan rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan derajat desentralisasi sehingga menjadi kinerja keuangan dapat dilihat pada lampiran 2.

Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal diukur menggunakan rasio. Pendapatan asli daerah dihitung dengan ukuran rasio ( $\text{Realisasi pendapatan asli daerah} / \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%$ ), dana perimbangan dihitung dengan ukuran rasio ( $\text{Realisasi dana perimbangan} / \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%$ ), dan belanja modal dihitung dengan ukuran rasio ( $\text{Realisasi belanja modal} / \text{Total belanja daerah} \times 100\%$ ). Perhitungan data yang telah diperoleh tersaji pada grafik berikut.



Gambar 4.1 Rasio Kabupaten Kulon Progo

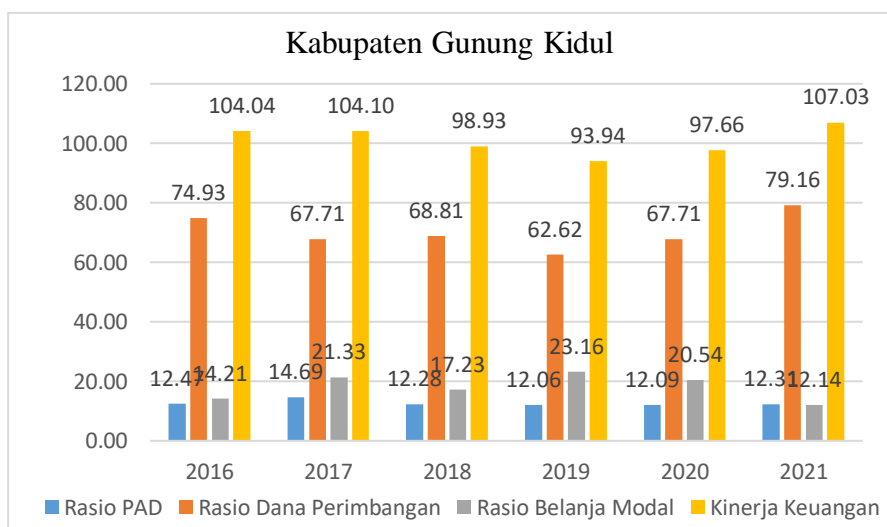
Gambaran kondisi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 4.1. Rasio pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 20,03%, walaupun dengan nilai rasio belanja modal paling rendah yaitu 14,46%, dengan rasio dana perimbangan yang cukup tinggi yaitu 68,07% menyebabkan nilai kinerja keuangan yang melambung mencapai nilai 117,52% yang menjadi kinerja keuangan tertinggi pada kabupaten Kulon Progo. Sedangkan rasio kinerja keuangan terendah yang terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 97,34% yang disebabkan oleh rasio dana perimbangan (60,01%) dan rasio pendapatan asli daerah (14%) yang rendah walaupun dengan nilai rasio belanja modal tertinggi (25,50%).



Gambar 4.2 Rasio Kabupaten Bantul

Gambaran kondisi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat

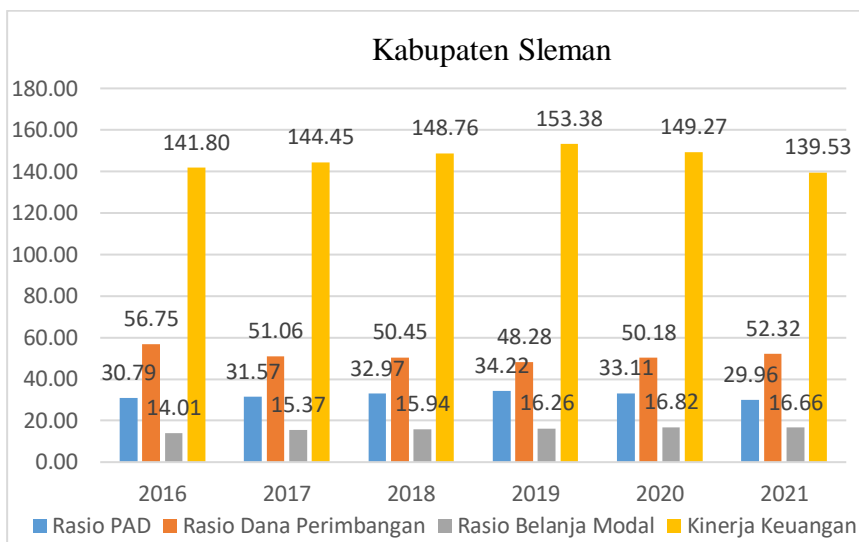
dilihat pada gambar 4.2. Rasio pendapatan asli daerah berada dalam rata-rata 21,73%, rasio dana perimbangan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama 5 tahun terakhir dan tetap berada di angka 60%, sedangkan rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar 3,29% yaitu 12,95% dimana pada tahun-tahun sebelumnya berada dinilai 14-16%. Fluktuasi rasio kinerja keuangan cenderung mengikuti naik-turunnya rasio pendapatan asli daerah. Seperti pada tahun 2017 rasio pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari nilai tahun sebelumnya sehingga menyebabkan kenaikan pada nilai kinerja keuangan. Pada saat rasio pendapatan asli daerah mengalami penurunan di tahun 2018, nilai kinerja keuangan juga ikut menurun. Sampai tahun 2021, ketika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan pun mengalami kenaikan walaupun nilai belanja modal berada pada titik terendah.



Gambar 4.3 Rasio Kabupaten Gunung Kidul

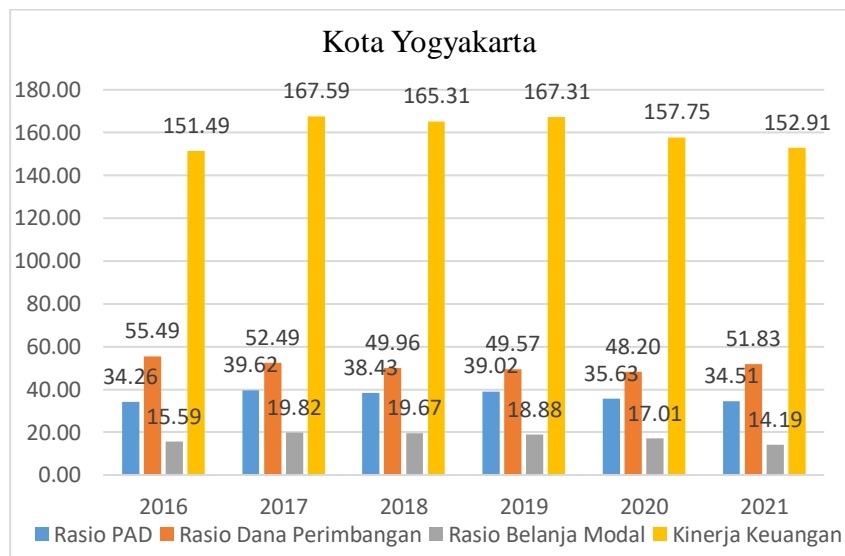
Gambar 4.3 menjelaskan kondisi variabel independen dan dependen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2021 yang disajikan dalam nilai rasio. Kabupaten Gunung Kidul menjadi daerah terendah dalam penerimaan pendapatan asli daerah pada Provinsi DIY tahun 2016-2021 dengan rata-rata sebesar 12,65%, berbanding terbalik dengan nilai terendah, Kabupaten Gunung Kidul menjadi penerima dana perimbangan tertinggi pada Provinsi DIY tahun 2016-2021 dengan nilai rata-rata 70,16%. Rasio belanja modal mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama 6 tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,7% dari tahun 2020 dengan nilai 20,54% menjadi 12,14%. Namun hal ini tidak memengaruhi naik turunnya rasio kinerja keuangan, yang mana rasio kinerja keuangan cenderung mengikuti fluktuasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Seperti tahun 2018 dimana rasio pendapatan asli daerah mengalami penurunan, rasio kinerja keuangan pun menurun sebesar 4,76% dari tahun sebelumnya yaitu 104,10% menjadi 98,93%. Dan kenaikan rasio dana perimbangan di

tahun 2021 diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar 8,62% dari tahun sebelumnya yaitu 97,66% menjadi 107,03%.



Gambar 4.4 Rasio Kabupaten Sleman

Gambaran kondisi variabel independen dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 yang dinilai dalam skala rasio tersaji dalam gambar 4.4. Rasio pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2019 secara konsisten mengalami kenaikan dan menurun ditahun 2020 dan 2021. Dengan nilai tertinggi di tahun 2019 sebesar 34,22% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 29,96%. Berbanding terbalik dengan rasio pendapatan asli daerah, rasio dana perimbangan mengalami penurunan dari tahun 2016-2019 dan kembali naik ditahun 2020 dan 2021. Rasio belanja modal secara konsisten terus meningkat sampai tahun 2020 walaupun tidak signifikan. Rasio kinerja keuangan mengalami kenaikan dan penurunan sejalan dengan kenaikan dan penurunan pada rasio pendapatan asli daerah. Seperti pada tahun 2019 rasio pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 32,97% menjadi 34,22% diikuti dengan kenaikan rasio kinerja keuangan 148,76% menjadi 153,38%. Kemudian rasio pendapatan asli daerah mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 33,11% diikuti penurunan kinerja keuangan menjadi 149,27%.



Gambar 4.5 Rasio Kota Yogyakarta

Gambar 4.5 menjelaskan kondisi variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dengan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan skala rasio Kota Yogyakarta tahun 2016-2021. Rasio pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta menjadi rasio pendapatan asli daerah tertinggi dalam Provinsi DIY tahun 2016-2021 dengan nilai rata-rata 36,91%. Rasio pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan sampai tahun 2021. Rasio dana perimbangan mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil selama 6 tahun pada rasio belanja modal. Rasio kinerja keuangan mengalami kenaikan dan penurunan sejalan dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada rasio pendapatan asli daerah. Terjadi kenaikan rasio pendapatan asli daerah sebesar 14,52% ditahun 2017 menjadi 39,62% yang diikuti kenaikan rasio kinerja keuangan menjadi 167,59%. Penurunan rasio pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2020 yang juga diikuti penurunan rasio kinerja keuangan menjadi 157,75%.

### 4.3 Analisis Data

Penelitian ini diuji dan dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis penelitian.

#### 4.3.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut gambaran analisis statistik deskriptif kuantitatif:



*Tabel 4. 1*  
*Analisis Statistik Deskriptif*

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
PAD	30	12,06	39,62	23,73	9,67
Dana Perimbangan	30	48,20	79,16	59,93	8,28
Belanja Modal	30	12,14	25,50	17,41	3,50
Kinerja Keuangan	30	93,94	167,59	125,92	24,37
Valid N	30				

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

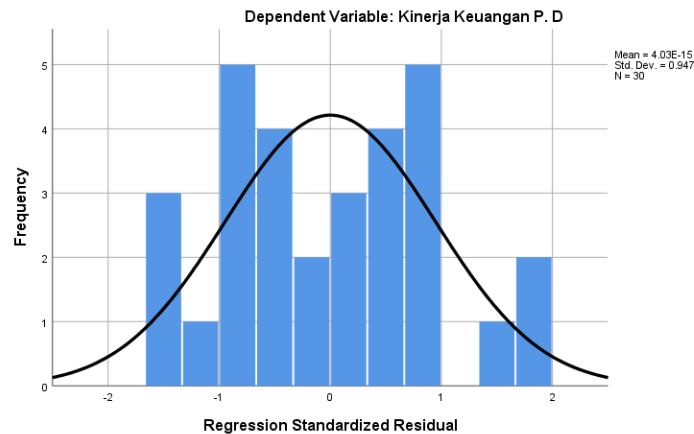
Berdasarkan Tabel 4.1 atas pengujian deskriptif statistik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Nilai minimum variabel pendapatan asli daerah adalah 12,06 diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019 dan nilai maksimum 39,62 diperoleh dari Kota Yogyakarta Tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (*mean*) 23,73 dan nilai standar deviasi 9,67.
- b. Nilai minimum variabel dana perimbangan adalah 48,20 diperoleh dari Kota Yogyakarta tahun 2020 dan nilai maksimum 79,16 diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021. Dengan nilai rata-rata (*mean*) 59,93 serta nilai standar deviasi 8,28.
- c. Nilai minimum variabel belanja modal adalah 12,14 diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 dan nilai maksimum 25,50 diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Dengan nilai rata-rata (*mean*) 17,41 serta nilai standar deviasi 3,50.
- d. Nilai minimum variabel kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 93,94 diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019 dan nilai maksimum 167,59 diperoleh dari Kota Yogyakarta tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (*mean*) 125,92 serta nilai standar deviasi 24,37.

### **4.3.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **4.3.2.1 Uji Normalitas**

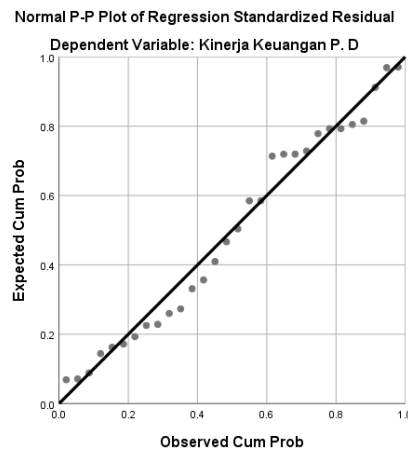
Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian data residual normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram. Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa data sekunder yang telah dilakukan uji normalitas, berikut grafik histogram.



*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Gambar 4.6 Uji Normalitas Data Grafik Histogram

Gambar 4.6 memperlihatkan grafik histogram normalitas data, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan grafik histogram yang memberikan pola distribusi melenceng ke kanan membentuk gunung. Tidak hanya dengan grafik histogram, uji normalitas data harus dapat dibuktikan dengan bukti lain diantaranya dengan menggunakan grafik P-P Plot. Berikut gambar 4.7 uji normalitas dengan P-P Plot.



*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Gambar 4.7 Uji Normalitas Data Grafik P-P Plot

Gambar 4.7 memperlihatkan grafik P-P Plot dengan titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilihat menggunakan uji statistik non paramedik *one Sample Kolmogorov-Smirnov*. Berikut hasil uji normalitas *One Sample Kolmogorov*.

*Tabel 4.2*  
*Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	30
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,124
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,200
Keterangan	Data terdistribusi normal

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh nilai probabilitas *Asymp. sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Karena  $0,200 > 0,05$  maka asumsi normalitas terpenuhi. Kesimpulan dari pengujian normalitas data menggunakan grafik histogram, grafik P-P Plot dan pengujian *One Sample Kolmogorov-smirnov* adalah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal.

#### 4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi autokorelasi antara periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan hasil sebagai berikut.

*Tabel 4.3*  
*Uji Autokorelasi Durbin-Watson*

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,976	Tidak terjadi autokorelasi

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,976. Jika  $du$  adalah 1,6498 dan  $4-du$  adalah 2,3502 maka  $1,6498 < 1,976 > 2,3502$  artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$ .

#### 4.3.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak

terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel berikut.

*Tabel 4.4*  
*Uji Multikolinieritas*

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
PAD	0,130	7,683	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Perimbangan	0,139	7,215	Tidak terjadi multikolinieritas
Belanja Modal	0,573	1,745	Tidak terjadi multikolinieritas

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji multikolinieritas dengan nilai *tolerance* pada variabel Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Belanja modal  $> 0,01$  dengan nilai *VIF* pada semua variabel  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) dalam model regresi.

#### 4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna menguji apakah terjadi ketidaksamaan dalam model regresi antara variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser* dengan kriteria jika koefisien parameter beta  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas.

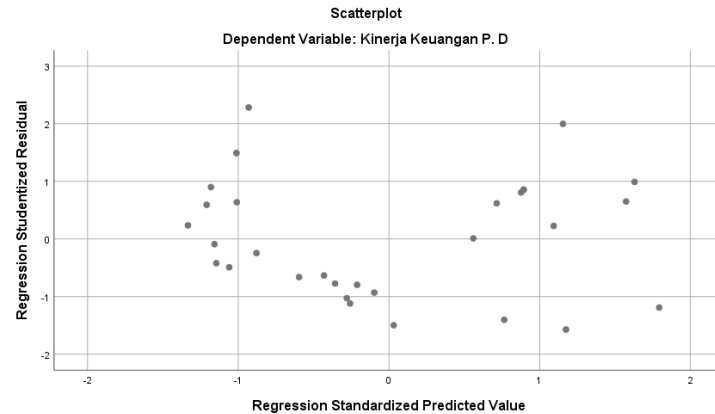
*Tabel 4.5*  
*Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser*

Variabel	<i>Sig.</i>	Keterangan
PAD	0,019	Terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0,016	Terjadi heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,243	Tidak terjadi heteroskedastisitas

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kurang dari 0,05 yang berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Pada variabel belanja modal  $0,243 > 0,05$  maka

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat diagram *scatterplot* pada gambar berikut.



*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas Diagram Scatterplot

Gambar 4.8 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar dibawah atau sekitar angka 0 pada sumbu Y, tidak membentuk pola yang jelas sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji besaran pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui bantuan program IBM SPSS *statistic version 25* diperoleh hasil analisis regresi linier berganda pada tabel berikut.

*Tabel 4.6*  
Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T	sig.	Keterangan
Konstanta	10,266	0,905	0,374	
PAD	3,028	28,418	0,000	H1 diterima
Dana Perimbangan	0,675	5,599	0,000	H2 diterima
Belanja Modal	0,193	1,375	0,181	H3 ditolak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 4.6 ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 10,266 + 3,028 + 0,675 + 0,198 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut.

- Konstanta sebesar 10,266 yang menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah jika tidak ada variabel independen yang dianggap konstan ( $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$ ) maka kinerja keuangan hasilnya konstan sebesar 10,266.
- Koefisien pendapatan asli daerah (PAD) meningkat sebesar 3,028 yang artinya apabila terjadi penambahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 3,028 atau 302,8%.
- Koefisien dana perimbangan meningkat sebesar 0,675 yang artinya apabila terjadi penambahan dana perimbangan sebesar 1% akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,675 atau 67,5%.
- Koefisien belanja modal meningkat sebesar 0,193 yang artinya apabila terjadi penambahan belanja modal sebesar 1% akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,193 atau 19,3%.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

##### 4.3.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besaran pengaruh variabel independen dan variabel dependen apabila hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besaran nilai  $R^2$  antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Dengan asumsi semakin besar atau semakin mendekati 1 (satu) artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan sebaliknya apabila semakin kecil nilai koefisien determinasi artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Hasil analisis koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 4.7*  
Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,994	0,993

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis koefisien determinasi diperoleh hasil *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,993 atau 99,3%. Hal ini artinya variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal memiliki pengaruh 99,3% terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 0,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian.

#### 4.3.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan uji t (t-test) dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada sig 5%. Hasil pengujian uji t disajikan pada tabel berikut.

*Tabel 4. 8*  
Uji Parsial (Uji t)

Model	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
PAD	28,418	1,706	0,000	H1 diterima
Dana Perimbangan	5,599	1,706	0,000	H2 diterima
Belanja Modal	1,375	1,706	0,181	H3 ditolak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai t hitung > t tabel, nilai t hitung pendapatan asli daerah sebesar  $28,418 > 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka H1 diterima atau variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Nilai t hitung dana perimbangan sebesar  $5,599 > 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka H2 diterima atau variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai t hitung belanja modal sebesar  $1,375 < 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,181 > 0,05$  maka H3 ditolak atau variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 4.9*  
Uji Simultan (Uji F)

Model	F hitung	F table	Sig.	Keterangan
1	1424,640	2,98	0,000	H4 diterima

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji simultan, variabel independen memiliki nilai F hitung  $1424,640 > 2,98$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data (teori, penelitian terdahulu dan analisis variabel independen dengan variabel dependen) pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 dilakukan pembahasan yang diuraikan sebagai berikut:

##### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $28,418 > 1,706$  dengan taraf signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020. Koefisien bernilai positif, maka setiap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Setiap kenaikan satu-satuan pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 3,028 atau 302,8%.



Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli yang mana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Apabila sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diterima semakin tinggi, maka akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga mengindikasikan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang semakin baik. Prastiwi & Aji (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya agar pemerintah daerah tidak bergantung terhadap dana bantuan berupa dana transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan atau program pemerintahan menunjukkan kemandirian pemerintah daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Sejalan dengan kondisi dan fakta variabel yang diteliti, dimana setiap kenaikan rasio pendapatan asli daerah akan diikuti dengan kenaikan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020), Leki dkk (2018), dan Maulina dkk (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah akan mempengaruhi tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak konsisten dengan penelitian Putri & Damayanti (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian bahwa perolehan kekayaan daerah berupa pendapatan asli daerah belum optimal sehingga tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah terkait.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung yang lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $5,599 > 1,706$  dengan nilai signifikansi dibawah  $0,05$  yaitu  $0,000$  yang artinya variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Koefisien bernilai positif, yang berarti apabila variabel dana perimbangan mengalami kenaikan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan. Setiap kenaikan satu-satuan pada

dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 0,675 atau 67,5%.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar dengan kegiatan atau program-program pemerintahan yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri (Wahyudin & Hasturi, 2020). Maka dengan adanya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hal ini dapat menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tingkat ketergantungan akan menyebabkan kemandirian pemerintah yang rendah. Hasil penguatan data dengan melihat nilai realisasi belanja menurut fungsinya yang dapat dilihat pada lampiran. Rata-rata pengalokasian belanja menurut fungsinya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalokasikan untuk sektor pendidikan, sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas pendidikan, pelayanan, dan fasilitas publik yang memadai untuk masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh daerah sudah dialokasikan sesuai target sehingga penggunaan dana perimbangan dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin & Hasturi (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauw & Riharjo (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung yang lebih kecil dari  $t$  tabel yaitu  $1,375 < 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,181 > 0,05$  yang berarti  $H_3$  ditolak, variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menandakan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal untuk perolehan asset tetap dan lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Realisasi belanja modal yang dilakukan belum dapat meningkatkan aktiva tetap pemerintah daerah dan menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang (Antari & Sendana, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut maka menandakan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan belum mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah yang menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi dan fakta variabel, yang mana saat belanja modal mengalami kenaikan atau penurunan, tidak memengaruhi posisi rasio kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan konsisten dengan penelitian Silvi (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menggunakan uji simultan (uji F) memperoleh nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel yaitu  $1424,640 > 2,98$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,993 atau 99,3% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebesar 99,3% dan sisanya 0,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Secara simultan atau secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Agustina (2018) menjelaskan bahwa variabel atau faktor-faktor harus dijalankan bersama agar menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil positif dan signifikan pada uji simultan mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam menyelaraskan pemanfaatan variabel dependen yaitu pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sehingga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara individual dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa ada sinergi yang baik, bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil dalam menggabungkan faktor-faktor tersebut sehingga memperoleh kinerja keuangan yang baik.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2019) yang menyatakan bahwa simultan atau secara bersama-sama variabel Belanja modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 akan meningkat.
2. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 akan meningkat.
3. Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya belanja modal belum dapat menghasilkan sumber keuangan jangka panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.
4. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa variabel atau faktor-faktor yang dijalankan bersama tidak terdapat masalah dalam menyelaraskan pemanfaatannya sehingga menciptakan kinerja keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Hasil penelitian tidak dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas karena penelitian ini hanya menguji Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode waktu yang lebih lama agar hasil penelitian lebih mendalam dan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh mengenai kinerja keuangan pemerintah Provinsi DIY. Serta menambah rasio keuangan selain rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah dan derajat desentralisasi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengingat terdapat rasio keuangan lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, R. (2017). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Periode Tahun 2012-2015)*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Antari, N. dan Sendana, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*. [online] Vol. 7 (2), pp. 1080-1110. Tersedia di: <https://www.researchgate.net/publication/323577879> PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Ayu, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*. [online] Vol. 3 (1), pp. 80-96. Tersedia di: <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/12007> [Diakses pada tanggal 4 Januari 2022].
- Febriansyah, A. (2019). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*. [online] Vol. 4 (1), pp. 34-38. Tersedia di: <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/87> [Diakses pada tanggal 16 November 2021].
- Hastuti, S. (2018). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Heryanti, C., Wahidahwati., dan Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. [online] Vol. 8 (8). Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4261> [Diakses pada tanggal 4 Januari 2022].

- Lathifa, H. dan Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*. [online] Vol. 8 (2). Tersedia di: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25695> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Leki, Y., Naukoko, A., dan Sumual, J. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. [online] Vol. 18 (05), pp. 164-174. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/21490> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almada.
- Malau, E. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Martantri, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2017)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Maulina, A., Alkamal, M., dan Fahira, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. [online] Vol. 5 (2), pp. 390-399. Tersedia di: <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/373> [Diakses pada tanggal 17 November 2021].
- Nauw, E. dan Riharjo, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. [online] Vol. 10 (6). Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056> [Diakses pada 4 Januari 2022].
- Nugraheni, E. dan Adi, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. [online] Vol. 20 (1), pp. 19-42. Tersedia di: <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/mraai/article/view/4398> [Diakses pada tanggal 24 Januari 2022].



- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, N. dan Aji, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*. [online] Vol. 28 (1), pp. 89-105. Tersedia di: <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/45> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Pratiwi, T. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyono, N., Fatimah, A., dan Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. [online] Vol. 5 (2), pp. 212-225. Tersedia di: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/2202> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Putri, N. dan Darmayanti, N. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen*. [online] Vol. 8 (5), pp. 2834-2861. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/cite/44688/ApaCitationPlugin> [Diakses Pada tanggal 4 Januari 2022].

- Ridwansah, D. (2021). Anggaran Daerah Lebih Besar Buat Pegawai Dibanding Belanja Modal. *Jawapos.com*. Tersedia di: <https://www.jawapos.com/ekonomi/08/06/2021/anggaran-daerah-lebih-besar-buat-pegawai-dibanding-belanja-modal/> [Diakses November 2021].
- Saputra, D. (2021). 20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi. *Bisnis.com*. Tersedia di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi> [Diakses pada November 2021].
- Saraswati, D. dan Rioni, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. [online] Vol. 9 (2), pp. 110-120. Tersedia di: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/462> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Silvi, D. (2021). *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016)*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Wahyudin, I. dan Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*. [online] Vol. 1 (1), pp. 86-97. Tersedia di: <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarij/article/view/2364> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Yanti, A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Yunita, P. dan Rasmini, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan. *E-Journal Akuntansi*. [online] Vol. 30 (4), pp. 1049-1065. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/56206/34458> [Diakses pada tanggal 10 April 2022].

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vidia Utami Putri

Alamat : Kp. Leuwikotok Rt 03 Rw 05 Desa Pasirlaja, Kecamatan  
Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 12 Agustus 2000

Agama : Islam

### Pendidikan

- SD : SDN Tonjong 02
- SMP : SMP Putra Pakuan
- SMK : SMKK Dwi Putri Husada
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 10 Juni 2022

Peneliti,

(Vidia Utami Putri)

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Data Penelitian (rasio pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2016-2020)**

<b>Pemerintah Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>Rasio Dana Perimbangan</b>	<b>Rasio Belanja Modal</b>	<b>Kinerja Keuangan P. D.</b>
Kab. Kulon Progo	2016	13,27	70,51	17,43	102,61
	2017	17,52	66,12	18,08	110,14
	2018	13,53	62,41	22,99	97,62
	2019	14,22	62,19	25,24	99,29
	2020	14,00	60,01	25,50	97,34
	2021	20,03	68,07	14,46	117,52
Kab. Bantul	2016	20,22	66,56	14,09	117,16
	2017	23,68	61,68	16,02	123,75
	2018	20,77	60,84	15,61	115,74
	2019	22,29	59,53	14,74	119,27
	2020	20,30	60,23	15,89	114,24
	2021	23,12	60,43	12,95	121,82
Kab. Gunung Kidul	2016	12,47	74,93	14,21	104,04
	2017	14,69	67,71	21,33	104,10
	2018	12,28	68,81	17,23	98,93
	2019	12,06	62,62	23,16	93,94
	2020	12,09	67,71	20,54	97,66
	2021	12,31	79,16	12,14	107,03
Kab. Sleman	2016	30,79	56,75	14,01	141,80
	2017	31,57	51,06	15,37	144,45
	2018	32,97	50,45	15,94	148,76
	2019	34,22	48,28	16,26	153,38
	2020	33,11	50,18	16,82	149,27
	2021	29,96	52,32	16,66	139,53
Kota Yogyakarta	2016	34,26	55,49	15,59	151,49
	2017	39,62	52,49	19,82	167,59
	2018	38,43	49,96	19,67	165,31
	2019	39,02	49,57	18,88	167,31
	2020	35,63	48,20	17,01	157,75
	2021	34,51	51,83	14,19	152,91

**Lampiran 2. Data perhitungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2016-2021.**

Rasio Kemandirian : Pendapatan Asli Daerah/Pendapatan Transfer

Rasio Ketergantungan: Pendapatan Trasfer/Total Pendapatan Daerah

Derajat Desentralisasi : Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah

Kinerja keuangan : rasio kemandirian + rasio ketergantungan + derajat desentralisasi

Pemerintah Kab/Kota	Tahun	R. Kemandirian (PAD/PT)	R. Ketergantungan (PT/TPD)	Derajat Desentralisasi (PAD/TPD)	Kinerja Keuangan
Kab. Kulon Progo	2016	18,83	70,51	13,27	102,61
	2017	26,50	66,12	17,52	110,14
	2018	21,68	62,41	13,53	97,62
	2019	22,87	62,19	14,22	99,29
	2020	23,33	60,01	14,00	97,34
	2021	29,42	68,07	20,03	117,52
Kab. Bantul	2016	30,38	66,56	20,22	117,16
	2017	38,39	61,68	23,68	123,75
	2018	34,13	60,84	20,77	115,74
	2019	37,44	59,53	22,29	119,27
	2020	33,71	60,23	20,30	114,24
	2021	38,27	60,43	23,12	121,82
Kab. Gunung Kidul	2016	16,64	74,93	12,47	104,04
	2017	21,70	67,71	14,69	104,10
	2018	17,84	68,81	12,28	98,93
	2019	19,26	62,62	12,06	93,94
	2020	17,86	67,71	12,09	97,66
	2021	15,55	79,16	12,31	107,03
Kab. Sleman	2016	54,26	56,75	30,79	141,80
	2017	61,82	51,06	31,57	144,45
	2018	65,34	50,45	32,97	148,76
	2019	70,88	48,28	34,22	153,38
	2020	65,97	50,18	33,11	149,27
	2021	57,26	52,32	29,96	139,53
Kota Yogyakarta	2016	61,74	55,49	34,26	151,49
	2017	75,48	52,49	38,43	165,31
	2018	76,93	49,96	38,43	165,31
	2019	78,72	49,57	39,02	167,31
	2020	73,92	48,20	35,63	157,75
	2021	66,58	51,83	34,51	152,91

### Lampiran 3. Hasil analisis Deskriptif Kuantitatif

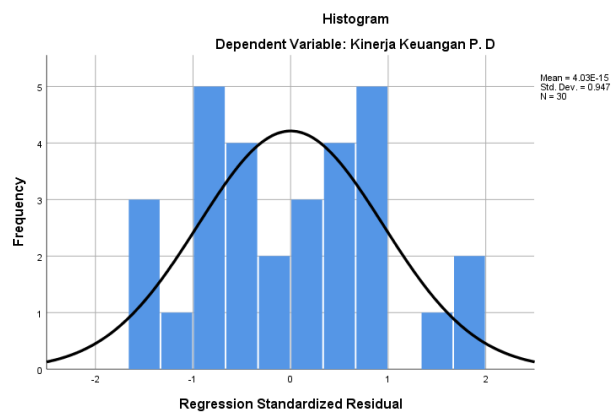
#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	12.06	39.62	23.7277	9.66750
Dana Perimbangan	30	48.20	79.16	59.9333	8.28326
Belanja Modal	30	12.14	25.50	17.4133	3.49834
Kinerja Keuangan P. D	30	93.94	167.59	125.9213	24.37014
Valid N (listwise)	30				

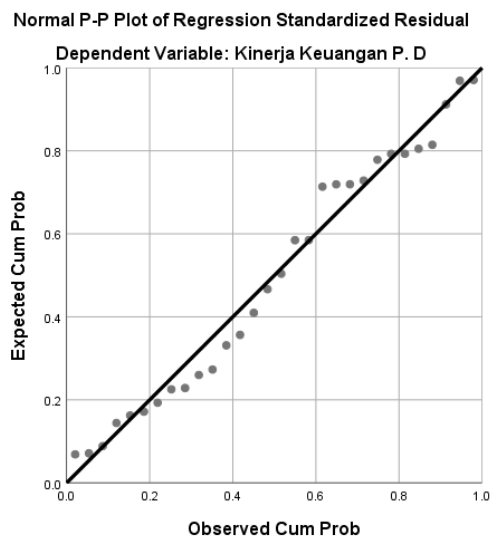
### Lampiran 4. Hasil uji asumsi klasik

#### 1. Uji normalitas

##### a. Grafik Histogram



##### b. Grafik P-P Plot



##### c. *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89502361
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.105
	Negative	-.124
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

#### 2. Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 <sup>a</sup>	.994	.993	2.00137	1.976

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

#### 3. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.130	7.683
	Dana Perimbangan	.139	7.215
	Belanja Modal	.573	1.745

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

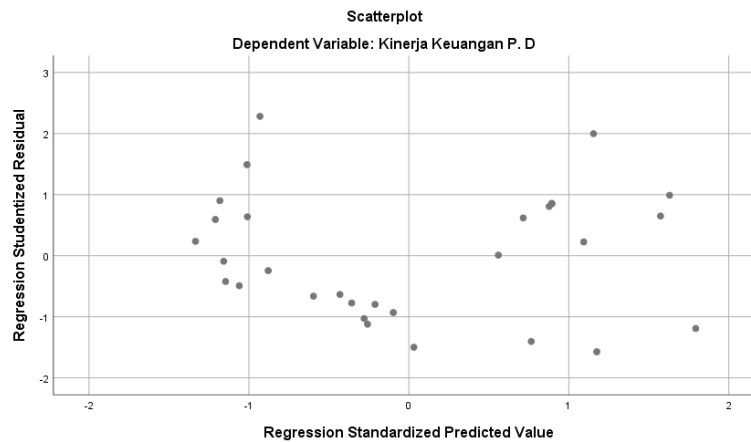
4. Uji Heteroskedastisitas  
a. Uji *Glejser*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.699	4.289		-1.562	.130
	PAD	.101	.040	1.010	2.496	.019
	Dana Perimbangan	.117	.046	1.008	2.570	.016
	Belanja Modal	-.063	.053	-.230	-1.195	.243

a. Dependent Variable: Abs\_RES

- b. Diagram *Scatterplot*



## Lampiran 5. Analisis Regresi Linier Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.266	11.339		.905	.374
	PAD	3.028	.107	1.201	28.418	.000
	Dana Perimbangan	.675	.121	.229	5.599	.000
	Belanja Modal	.193	.140	.028	1.375	.181

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25



### Lampiran 6. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 <sup>a</sup>	.994	.993	2.00137	1.976

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

### Lampiran 7. Uji Parsial (uji t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10.266	11.339		.905	.374
	PAD	3.028	.107	1.201	28.418	.000
	Dana Perimbangan	.675	.121	.229	5.599	.000
	Belanja Modal	.193	.140	.028	1.375	.181

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

### Lampiran 8. Uji Simultan (uji F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17119.071	3	5706.357	1424.640	.000 <sup>b</sup>
	Residual	104.142	26	4.005		
	Total	17223.214	29			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan P. D

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

**Lampiran 9. Persentase Belanja menurut Fungsinya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2016-2021.**

<b>Fungsi Belanja</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kab. Kulon Progo</b>	<b>Kab. Bantul</b>	<b>Kab. Gunung Kidul</b>	<b>Kab. Sleman</b>	<b>Kota Yogyakarta</b>
Pelayanan Umum	2016	24,25	23,96	26,10	27,75	25,84
	2017	25,51	27,39	26,94	31,70	18,98
	2018	24,60	11,66	28,41	33,48	24,64
	2019	24,83	29,45	30,69	37,06	24,74
	2020	23,54	10,12	27,35	34,77	27,58
	2021	24,65	54,41	27,88	24,36	83,44
Ketertiban dan Keamanan	2016	0,66	0,98	0,65	0,92	0,03
	2017	1,72	1,16	0,69	1,15	2,55
	2018	0,71	1,00	0,74	1,03	2,29
	2019	2,46	1,54	2,14	1,05	2,88
	2020	1,13	3,99	2,85	1,11	2,34
	2021	1,03	0,73	1,27	1,26	1,35
Ekonomi	2016	6,57	4,69	4,85	7,83	5,52
	2017	7,70	6,45	4,70	6,05	11,82
	2018	5,71	23,80	4,65	5,67	10,07
	2019	4,80	6,80	3,85	5,28	10,80
	2020	3,86	26,02	3,59	4,16	9,47
	2021	4,40	9,70	4,93	5,92	0,93
Lingkungan Hidup	2016	0,29	0,86	1,34	1,18	2,87
	2017	0,55	1,15	2,84	1,40	4,98
	2018	0,67	2,09	3,59	1,61	7,55
	2019	0,97	1,95	1,94	1,89	4,67
	2020	0,88	1,27	1,16	1,67	4,15
	2021	2,21	1,11	1,14	2,05	2,11
Perumahan dan Fasilitas Umum	2016	12,86	9,33	6,83	9,92	11,19
	2017	12,08	9,57	12,91	12,88	10,76
	2018	10,41	7,45	9,86	12,98	8,94
	2019	11,57	8,24	6,60	11,58	11,58
	2020	7,30	4,20	2,21	9,36	8,54
	2021	10,45	2,12	5,24	16,82	11,75
Kesehatan	2016	17,02	19,05	14,69	17,98	16,74

	2017	17,81	17,76	13,21	15,77	19,86
	2018	25,08	19,18	13,10	14,31	19,26
	2019	23,46	17,89	15,87	14,15	19,13
	2020	26,42	21,02	18,68	17,21	21,74
	2021	21,60	13,39	18,90	17,22	0,21
Pariwisata dan Budaya	2016	0,49	0,93	0,90	0,71	0,90
	2017	0,84	1,71	1,30	0,82	2,10
	2018	0,92	1,15	1,13	1,16	2,15
	2019	1,77	1,40	4,17	1,22	2,20
	2020	6,97	1,22	5,11	3,03	2,32
	2021	6,75	0,32	2,97	1,41	0,05
Pendidikan	2016	37,28	39,49	43,62	33,16	35,32
	2017	33,16	33,29	36,27	29,48	27,36
	2018	31,07	32,01	37,41	28,51	23,62
	2019	29,39	31,32	33,84	26,64	22,36
	2020	29,20	30,53	38,15	27,59	22,54
	2021	27,99	17,26	35,15	28,98	0,00
Perlindungan Sosial	2016	0,57	0,70	1,02	0,56	1,59
	2017	0,91	1,54	1,13	0,73	1,59
	2018	0,84	1,67	1,10	1,23	1,48
	2019	0,75	1,42	0,89	1,13	1,65
	2020	0,68	1,19	0,91	1,10	1,32
	2021	0,93	0,94	2,51	1,98	0,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.